



LAPORAN AKTUALISASI

PEMBUATAN BANK KONTAK DPR RI

Disusun oleh:

Nama : Ken Swari Mulia Nanda Putri, S.I.Kom
NIP : 199510262022022001
Jabatan : Jurnalis
Unit Kerja : TVR Parlemen

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN VII
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI**

PEMBUATAN BANK KONTAK DPR RI

Disusun oleh:

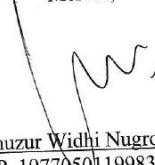
**Nama : Ken Swari Mulia Nanda Putri, S.I.Kom
NIP : 199510262022022001
Jabatan : Jurnalis
Unit Kerja : TVR Parlemen**

Peserta Diklat,



Ken Swari Mulia, Nanda Putri
NIP. 199510262022022001

Mentor,



M. Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P
NIP. 19770501199831003

Coach,



Agus Supriyono, S.S., M.A.P
NIP. 196902082003121003

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN VII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPR RI
2022**

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan rancangan aktualisasi dalam rangka Latsar CPNS Golongan III angkatan VII dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, shalawat serta salam penulis haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Rancangan aktualisasi ini berisi isu-isu aktual yang ada di unit kerja penulis yaitu Bagian Televisi dan Parlemen. Dari tiga isu aktual tersebut dipilih satu isu utama atau core isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini. Dari isu utama ini, maka ditetapkanlah gagasan kreatif yang menjadi pemecahan masalah atas isu utama. Gagasan kreatif ini akan diterapkan di unit kerja penulis yaitu Bagian Televisi dan Parlemen.

Penyusunan rancangan aktualisasi ini bisa rampung dengan baik karena mendapat dukungan berupa bimbingan, arahan, nasehat, saran, dan kerja sama semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H. selaku Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen
2. Bapak M. Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P. selaku Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi selaku atasan langsung sekaligus mentor aktualisasi
3. Bapak Agus Supriyono, S.S.,M.A.P selaku coach aktualisasi
4. Ibu Reny Amir, S.H., M.M., MLI selaku penguji rancangan aktualisasi

5. Seluruh pegawai TVR Parlemen yang telah bersedia berkolaborasi untuk mendukung rancangan aktualisasi
6. Seluruh teman-teman Divisi Redaksi yang menyambut baik program aktualisasi
7. Teman-teman Latsar CPNS Golongan III Angkatan VII terutama kelompok III sebagai teman seperjuangan untuk menyelesaikan rangkaian latsar
8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Penulis sadar bahwa rancangan aktualisasi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan yang lebih baik lagi.

Daftar Isi

BAB I	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Dasar Hukum	8
C. Tujuan.....	9
BAB II	10
A. Visi dan Misi Unit Kerja	10
B. Struktur Organisasi	11
C. Tugas dan Fungsi Jabatan	11
BAB III	13
A. Identifikasi Isu.....	13
A.1 Tidak ada crisis plan untuk menghadapi situasi krisis	13
A.2 Penulisan berita masih tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI.....	15
A.3 Tidak ada database kontak tenaga ahli anggota DPR RI	17
B. Penetapan Isu Prioritas	21
B.1 Teknik Analisis Isu.....	21
B.2 Pemilihan Isu Prioritas	22
C. Gagasan Pemecahan Isu.....	22
BAB IV	25
A. Rancangan Aktualisasi	25
B. Stakeholder	29
C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	30
D. Analisis Dampak	30
E. Jadwal Kegiatan.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selain itu, Pemerintah sudah menetapkan nilai-nilai dasar (core values) BerAKHLAK sebagai dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kerja individu/instansi.

Pelatihan Dasar CPNS sebagai pelatihan terintegrasi bagi CPNS bertujuan menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK dalam mendukung employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Arus globalisasi disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik secara regional, nasional maupun global. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara 2 yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain pelatihan yang adaptif, dinamis, fleksibel, dan responsif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai awal pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil dan penguatan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Pelatihan diselenggarakan secara modern yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikombinasikan dengan pembelajaran klasikal yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan hal tersebut, penyempurnaan dan pengayaan desain Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Terpadu yang modern melalui penyelenggaraan Blended Learning telah sejalan dengan perkembangan pemanfaatan teknologi,

informasi, dan komunikasi dalam Pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di masa prajabatan. Pelatihan tersebut diselenggarakan dalam rangka pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai bidang tugas sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government. Perspektif yang didasari nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kedudukan dan perannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang Pegawai Negeri Sipil.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162)
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 4 Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

C. Tujuan

Pelatihan Dasar CPNS sebagai pelatihan terintegrasi bagi CPNS bertujuan menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK dalam mendukung employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Terintegrasi dalam hal ini merupakan perpaduan antara jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang. Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS bagi para CPNS adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

1. Visi Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

a. Visi

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

b. Misi

- Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia.

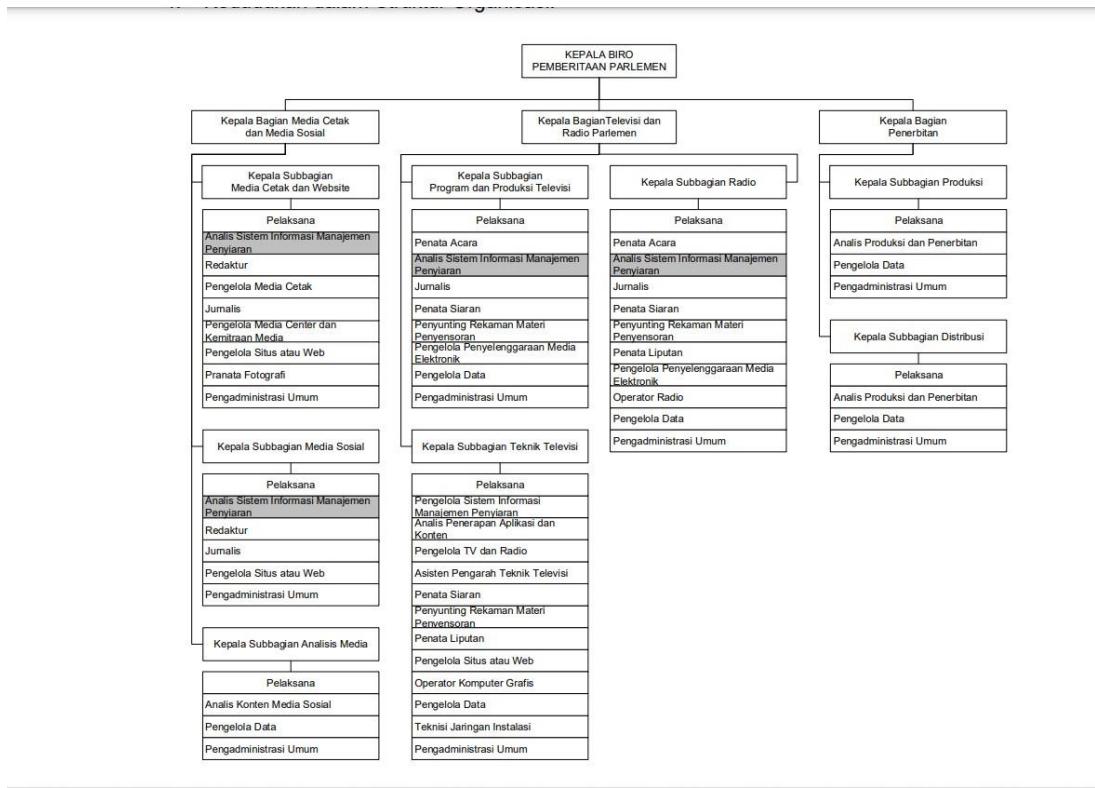
2. Biro Pemberitaan Parlemen

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan . dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan

3. Televisi dan Radio Parlemen

Televisi dan Radio Parlemen adalah unit produksi televisi dan radio siaran terbatas di bawah Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI. Televisi Parlemen diresmikan pada tanggal 8 Januari 2007 oleh ketua DPR RI HR Agung Laksono. Pada Januari 2017, Televisi Parlemen berubah nama menjadi Televisi dan Radio Parlemen.

B. Struktur Organisasi



Tabel II. 1 Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen

C. Tugas dan Fungsi Jabatan

Tugas dan Fungsi Jabatan Jurnalis

Melaksanakan peliputan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Uraian Tugas :

1. Menyusun konsep *press release* kepada atasan
 2. Menyampaikan *press release* kepada media massa untuk dipublikasikan
 3. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel
 4. Membuat konsep laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan kinerja pelaksanaan tugas

5. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

A.1 Tidak ada crisis plan untuk menghadapi situasi krisis

Dalam kajian komunikasi krisis, krisis adalah suatu keadaan yang menghasilkan dampak negatif baik pada organisasi, produk, maupun reputasi. Dalam situasi krisis, terjadi peningkatan arus informasi secara signifikan, sistem komunikasi kehilangan keseimbangan, dan kandungan emosi yang mencolok. Melihat dari definisi dan situasi krisis, maka DPR RI bisa dikategorikan sebagai instansi pemerintahan yang sering mengalami krisis. DPR RI tidak hanya sekali dua kali mengalami kondisi krisis, namun cukup sering dengan jenis krisis yang bisa diprediksi dan berulang. Krisis yang dimaksud ini adalah beberapa pemberitaan DPR RI secara negatif yang menyebabkan kehebohan di Indonesia. Efek yang paling sering terjadi adalah memburuknya reputasi DPR RI di mata masyarakat. Hal ini tentu akan membuat DPR RI kesulitan dalam jangka panjang terkait kebijakan-kebijakan DPR RI.

Kondisi saat ini

Merujuk pada jurnal yang berjudul “*Upaya Penanganan Krisis Relasi Media DPR dalam Kontroversi UU MD3*”, disebutkan bahwa upaya penanganan krisis DPR RI dalam kontroversi UU MD3 masih belum optimal karena tidak memenuhi sepuluh strategi krisis menurut Rachmad Kriyanto¹. Serupa dengan hal tersebut, jurnal yang berjudul “*Strategi Komunikasi Krisis DPR RI Menggunakan Instagram Menghadapi Penolakan RUU Cipta Kerja*”, strategi denial efektif untuk menghadapi krisis akibat penolakan RUU Cipta Kerja. Berkaca dari hal tersebut, tim komunikasi DPR RI perlu melakukan analisis dan evaluasi terkait strategi komunikasi krisis untuk menyusun konsep strategi menghadapi krisis apabila terjadi krisis.²

Dengan potensi terjadinya krisis yang berulang, sudah seharusnya DPR RI mempunyai *crisis plan* yang bertujuan untuk mengendalikan efek negatif krisis pada reputasi DPR RI. Dengan adanya *crisis plan*, efek negatif krisis dapat diminimalisir. Namun sayangnya, lembaga DPR RI belum memiliki *crisis plan* atau panduan menghadapi situasi krisis. Padahal, sebagai lembaga atau instansi yang mengalami krisis

¹ Indah Fajar Rosalina, “Upaya Penanganan Krisis Relasi Media DPR dalam Kontroversi UU MD3”, *Jurnal : Communication (online)*, Vol. 11 No. 1 April 2020, hal 27 – 28, diakses pada 07 Juli 2022

² Indra Iskandar, Dadang Rahmat Hidayat, dan Centurion Chandratama Priyatna, “Strategi Komunikasi Krisis DPR RI Menggunakan Instagram Menghadapi Penolakan RUU Cipta Kerja”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* / Volume 12, No. 2 Desember 2021, hal 119, diakses pada 07 Juli 2022

berulang, crisis plan adalah hal yang wajib dimiliki oleh DPR RI. Mengutip Handini Ardiyanti dalam bukunya yang berjudul *“Humas Parlemen : Konsep dan Aplikasi”* mengatakan bahwa manajemen krisis pada lembaga legislatif mutlak adanya karena lembaga legislatif berada dalam dinamika politik yang tinggi³. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPR RI terutama Biro Pemberitaan Parlemen perlu memiliki *crisis plan* atau panduan untuk menghadapi situasi krisis.

Kondisi yang diharapkan

DPR RI mempunyai crisis plan untuk menghadapi krisis, sehingga efek negatif krisis dapat diminimalisir dan seiring dengan upaya untuk memperbaiki reputasi DPR RI. Ketika terjadi krisis, Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI dapat menjalankan mekanisme manajemen krisis melalui crisis plan, sehingga efek negatif krisis tidak menimbulkan kerugian yang besar.

Dampak

Jika tidak ada *crisis plan*, DPR RI akan kesulitan mengatasi krisis yang dalam hal ini adalah pemberitaan yang menyudutkan DPR RI. Kegagalan mengendalikan krisis mengakibatkan reputasi DPR makin buruk. Dampak jangka panjangnya adalah DPR RI akan kesulitan mendapatkan dukungan publik terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat meskipun kebijakan tersebut sebenarnya berpihak pada rakyat. Selain dampak bagi anggota DPR RI, hal ini juga berdampak pada Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung anggota DPR RI terutama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Sebab, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI sebagai corong untuk menyampaikan kinerja anggota DPR RI telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberi tahu masyarakat apa saja yang dikerjakan anggota DPR RI untuk rakyat.

Penerapan Nilai – Nilai Dasar Bela Negara

Bila melihat kembali ke agenda I mengenai nilai-nilai bela negara, bila isu crisis plan ini bisa diselesaikan dengan baik, maka hal ini juga berarti telah menjalankan lima nilai – nilai bela negara yaitu:

1. Cinta Tanah Air
Indikator : Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara
Indikator : Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya
3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara
Indikator : Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

³ Handrini Ardiyanti, “Humas Parlemen : Konsep dan Aplikasi” (Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), hal 70

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Indikator : Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara

5. Kemampuan Awal Bela Negara

Indikator : Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelektual

A.2 Penulisan berita masih tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI

KBBI adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI merupakan kamus resmi bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. KBBI menjadi rujukan utama dalam penulisan kata baku bahasa Indonesia sehingga semua standar penulisan kata baku bahasa Indonesia harus mengikuti KBBI. Saat ini KBBI ada dalam bentuk buku atau kamus pada umumnya dan ada dalam versi daring. KBBI terbaru dalam versi kamus adalah KBBI edisi V. KBBI versi daring dapat diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> atau instal aplikasi “Kamus Besar Bahasa Indonesia”.

PUEBI adalah singkatan dari Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI adalah panduan penulisan bahasa Indonesia yang resmi sehingga penulisan kalimat yang benar adalah sesuai dengan PUEBI. PUEBI mengatur cara menulis ejaan yang benar. Penulisan bahasa Indonesia yang diatur dalam PUEBI meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. PUEBI menjadi penyempurna sekaligus pengganti EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) berdasarkan Permendikbud Nomor 50 tahun 2015. Saat ini PUEBI telah berbentuk pdf dan dapat diakses di <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf> dan bisa juga mengakses <https://puebi.js.org/>

Kondisi saat ini

Penulisan berita tidak hanya harus mengikuti kaidah *news values* dan unsur 5W+IH, tetapi juga harus mengikuti KBBI dan PUEBI sebagai standar resmi penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya penulisan naskah berita di TVR Parlemen mengacu pada KBBI dan PUEBI. Namun, masih banyak naskah berita yang tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI.

PASCA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI MENGADAKAN ACARA HALAL BI HALAL DI RUANG RAPAT PANSUS C GEDUNG NUSANTARA DUA SELAIN HALAL BI HALAL ACARA INI JUGA MENGHADIRKAN SIRAMAN ROHANI DARI NARASUMBER RIDA HESTI RATNASARI ACARA HALAL BI HALAL PUN DITUTUP DENGAN DENGAN SESI ARISAN DAN DOORPRICE

ACARA HALAL BI HALAL PASCA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH INI JUGA MENJADI PENANDA AKAN AKTIFNYA KEMBALI KEGIATAN-KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI YANG SEMPAT TERHENTI PADA MASA WABAH COVID-19 KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TANTI SETYANTA NUGRAHA MENGATAKAN DALAM WAKTU DEKAT DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI AKAN MENGADAKAN RAPAT UNTUK MEMBAHAS KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN DI BIDANG PENDIDIKAN YANG TERDAMPAK WABAH COVID-19 DAN MENGADAKAN KEMBALI KEGIATAN-KEGIATAN RUTIN DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gambar III. 1 : Contoh Penulisan Berita yang Tidak Sesuai dengan KBBI dan PUEBI

Dalam potongan naskah berita di atas, terdapat kesalahan pada penulisan kata halal bi halal dan idul fitri. Penulisan kata halal bi halal yang benar menurut KBBI adalah halalbihalal tanpa spasi. Selain itu, juga terdapat kesalahan pada penulisan Idul Fitri. Penulisan yang benar menurut KBBI adalah Idulfitri tanpa spasi. Penulisan Idulfitri digabung tanpa spasi karena kata idul dan fitri adalah gabungan kata yang sudah baku. Begitu pula dengan penulisan halalbihalal. Dalam PUEBI, gabungan kata yang sudah padu harus ditulis serangkai atau tanpa spasi.

Kondisi yang diharapkan

Penulisan berita sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Penulisan berita yang sesuai dengan KBBI dan PUEBI sebagai wujud untuk menjaga dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika diterapkan, TVR Parlemen akan menjadi satu-satunya media yang menerapkan KBBI dan PUEBI secara murni dan sepenuhnya. Sebagai media pemerintah, TVR Parlemen secara tidak langsung mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mendukung pemerintah untuk melestarikan bahasa Indonesia.

Dampak

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, namun juga identitas bangsa Indonesia. Jika penggunaan bahasa Indonesia tetap dibiarkan keliru maka banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Dampak jangka panjangnya adalah eksistensi bahasa Indonesia semakin lemah dan masyarakat Indonesia tidak tahu bagaimana penulisan bahasa Indonesia yang sebenarnya.

Media adalah sumber informasi masyarakat Indonesia, jika media saja tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung media menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang keliru.

Penerapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan berita adalah keharusan. Selain mematuhi kaidah berbahasa Indonesia, penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah implementasi peristiwa Sumpah Pemuda dan meneladani sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga adalah wujud dalam menerapkan nilai-nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air dan bangga menggunakan produk bangsa Indonesia.

A.3 Tidak ada database kontak tenaga ahli anggota DPR RI

Kondisi saat ini

TVR Parlemen adalah TV di bawah naungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan tugas dan fungsi mendukung pemberitaan kegiatan DPR RI melalui siaran televisi. Oleh karena itu, anggota DPR RI merupakan sumber utama informasi dalam setiap program yang ada di TVR Parlemen. Untuk memudahkan TVR Parlemen dalam menghubungi anggota DPR RI yang akan menjadi narasumber acara, maka butuh kontak yang bisa dihubungi untuk melancarkan komunikasi dengan anggota DPR RI terkait teknis acara. Maka dibutuhkan kumpulan kontak-kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI, baik sekretariat AKD (Alat Kelengkapan Dewan), TA (Tenaga Ahli) anggota DPR RI bahkan anggota DPR RI itu sendiri. Selama ini, kontak-kontak yang berhubungan anggota DPR RI didapatkan secara personal masing-masing tidak terkumpul menjadi satu, sehingga ketika membutuhkan kontak anggota DPR RI, jurnalis harus mencari secara mandiri kontak-kontak tersebut. Tidak adanya database kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI ini juga dikuatkan oleh pernyataan Koordinator Liputan TVR Parlemen, Sigit Rilo Tambudi melalui pesan chat Whatsapp.



Gambar III. 2 : Chat Penulis dengan Koordinator Liputan TVR Parlemen

(Penulis sudah mendapatkan izin yang bersangkutan untuk mempublikasikan isi chat)

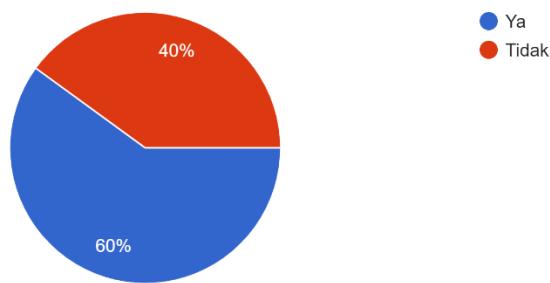
Oleh karena itu, butuh database yang berisi kontak- tenaga ahli anggota DPR RI untuk memudahkan komunikasi dengan anggota tersebut yang nantinya juga mempersingkat waktu dalam pencarian kontak anggota DPR RI. Di beberapa media, terdapat divisi khusus yang bertugas untuk menghubungi narasumber sehingga divisi inilah yang memiliki database narasumber berita. Sedangkan di TVR Parlemen, belum ada divisi khusus yang memiliki database narasumber berita karena kontak anggota

DPR RI didapatkan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pembuatan database kontak anggota DPR RI dapat mempermudah jurnalis untuk menghubungi narasumber yang dalam hal ini adalah anggota DPR RI.

Beberapa jurnalis mengeluhkan kesulitan mendapatkan narasumber anggota DPR RI pada masa reses atau ketika agenda DPR RI bersifat tertutup. Pada masa persidangan, jurnalis mendapatkan narasumber anggota DPR RI cukup mudah karena turut meliput agenda anggota DPR RI. Namun di masa reses, beberapa jurnalis mengalami kesulitan untuk menulis berita karena anggota DPR RI tidak berada di Komplek Parlemen. Pada masa reses, jurnalis harus mencari anggota DPR RI secara mandiri untuk narasumber penulisan berita sehingga jurnalis harus mencari kontak-kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI secara mandiri. Untuk mendapatkan kontak anggota DPR RI, jurnalis biasanya mendatangi sekretariat AKD di Gedung Nusantara, Nusantara I, Nusantara II, dan Nusantara III sedangkan posisi kantor TVR Parlemen ada di Nusantara IV. Jauhnya jarak kantor TVR Parlemen dengan sekretariat AKD membuat jurnalis harus menyiapkan alokasi waktu khusus untuk mendapatkan kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI. Hal ini diperkuat dengan hasil koesioner penulis terkait pembuatan Bank Kontak DPR RI, di mana mayoritas responden menyebutkan mereka kesulitan dalam mendapatkan kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI, terutama ketika masa reses. Bahkan, hasil koesioner menyebutkan, semua responden sepakat bahwa database kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI diperlukan.

Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI (seperti TA DPR RI atau Sekretariat AKD)?

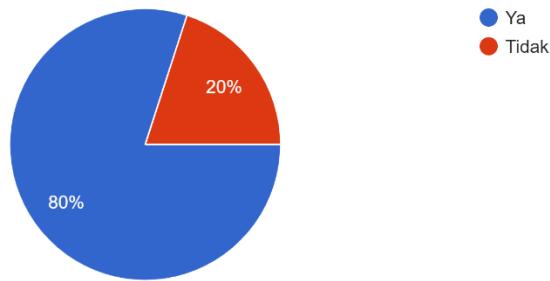
10 responses



Gambar III. 3 : Hasil Koesioner Terkait Pembuatan Bank Kontak DPR RI

Ketika masa reses, apakah reporter kesulitan untuk mendapatkan narasumber (anggota DPR RI) untuk kepentingan liputan?

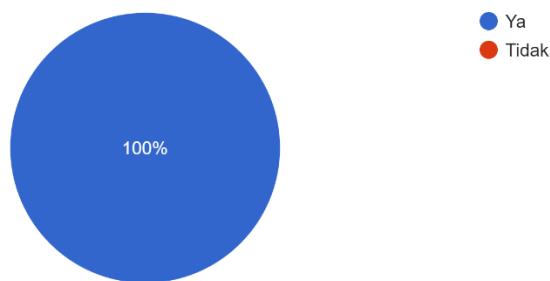
10 responses



Gambar III. 4 : Hasil Koesioner Terkait Pembuatan Bank Kontak DPR RI

Perlukah memiliki database yang berisi kumpulan kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI (seperti TA anggota DPR RI atau Sekretariat AKD)?

10 responses



Gambar III. 5 Hasil Koesioner Terkait Pembuatan Bank Kontak DPR RI

Kondisi yang diharapkan

Dengan adanya kumpulan kontak tenaga ahli anggota DPR RI, maka dapat mempersingkat waktu pencarian kontak anggota DPR RI sehingga dapat mempercepat proses produksi berita. Dengan adanya kumpulan kontak, jurnalis tidak perlu harus jauh-jauh ke sekretariat AKD untuk mendapatkan narasumber anggota DPR RI.

Dampak

Pencarian kontak narasumber membutuhkan waktu, sehingga pencarian kontak harus diberi alokasi waktu khusus untuk mencari narasumber. Jika ternyata narasumber utama tidak bersedia, maka harus mencari kontak narasumber yang lain dan tentu saja membutuhkan alokasi waktu lagi, terlebih bila bagi jurnalis baru yang tidak memiliki kontak narasumber. Pencarian kontak narasumber yang lama tentu akan memperlambat produksi program suatu acara yang dalam hal ini adalah program TVR Parlemen. Keterlambatan produksi program acara menyebabkan program acara tidak berjalan dengan baik karena kesulitan mendapatkan narasumber.

Penerapan Nilai – Nilai Dasar Bela Negara

Bila melihat kembali ke agenda I mengenai nilai-nilai bela negara, pembuatan database kontak anggota DPR RI secara tidak langsung menjalankan nilai-nilai dasar bela negara, berikut lima nilai-nilai bela negara yang dijalankan pada isu ini :

1. Cinta Tanah Air

Indikator : Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara

2. Sadar Berbangsa dan Bernegara

Indikator : Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya

3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Indikator : Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Indikator : Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara

5. Kemampuan Awal Bela Negara

Indikator : Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta integritas

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Analisis Isu

Berdasarkan pemaparan sebelumnya tentang tiga isu aktual di Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya dalam lingkup Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Unit Kerja TVR Parlemen, ketiga isu tersebut akan ditapis atau disaring lagi mana isu yang perlu diangkat. Untuk memilih manakah isu yang perlu diangkat, maka digunakanlah metode tapisan dengan alat bantu yang bernama USG yaitu *Urgency* atau seberapa mendesak isu harus segera dibahas atau ditangani, *Seriousness* yaitu seberapa serius isu harus

dibahas bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, dan *Growth* yaitu seberapa besar dampak buruk yang terjadi bila tidak segera ditangani.

Indikator USG	Skala Nilai	Keterangan
<i>Urgency</i>	1 sampai 5	Semakin tinggi nilainya semakin mendesak suatu masalah untuk segera diselesaikan.
<i>Seriousness</i>	1 sampai 5	Semakin tinggi nilainya semakin tinggi dampak yang dihasilkan bila tidak segera diselesaikan.
<i>Growth</i>	1 sampai 5	Semakin tinggi nilainya semakin tinggi potensi untuk menyebabkan terjadinya masalah baru bila tidak diselesaikan.

Tabel III. 1 : Indikator Penilaian Isu USG

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Tidak memiliki crisis plan dalam menghadapi krisis	3	5	3	11
2	Banyak penulisan berita yang tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI	3	5	4	12
3	Tidak memiliki database kontak tenaga ahli anggota DPR RI	5	5	4	14

Tabel III. 2 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Berdasarkan hasil penilaian isu di atas, isu tidak memiliki database kontak Sekretariat AKD, Sekretariat Fraksi, dan TA anggota DPR RI memiliki nilai tapisan isu tertinggi yaitu 14. Oleh karena itu, isu yang terpilih menjadi isu utama yang akan diangkat untuk menjadi program rancangan aktualisasi adalah isu tidak memiliki database kontak anggota DPR RI.

C. Gagasan Pemecahan Isu

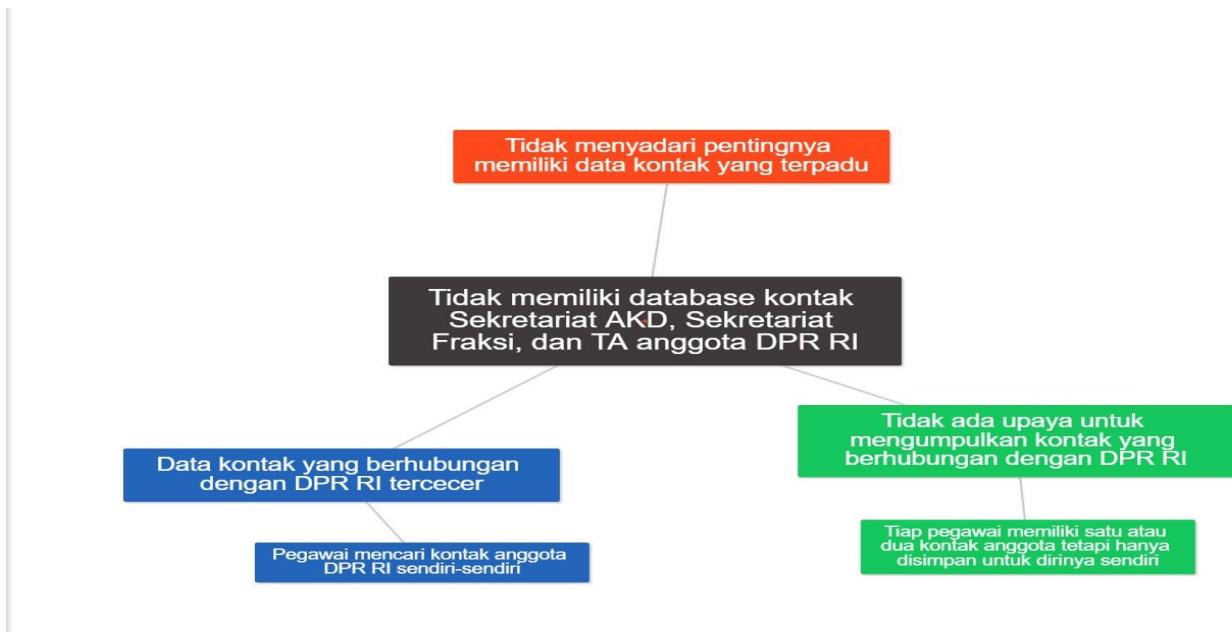
Setelah menentukan isu prioritas yang akan diangkat untuk menjadi program aktualisasi, maka ditetapkanlah gagasan kreatif sebagai solusi atas isu prioritas tersebut. Isu yang diangkat adalah tidak memiliki database kontak Sekretariat AKD, Sekretariat Fraksi, dan TA anggota DPR RI. Sedangkan gagasan yang diajukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah **“Pembuatan Bank Kontak TA DPR RI”**.

Alur Penerapan Gagasan Kreatif : :

1. Identifikasi dan penyusunan format entry data
2. Berkoordinasi dengan Sekretariat AKD, Sekretariat Fraksi, dan TA anggota DPR RI
3. Input data kontak ke Bank Kontak DPR RI
4. Sosialisasi penggunaan Bank Kontak DPR RI dan penetapan pihak-pihak yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI

Analisis Penyebab Terjadinya Isu

Untuk mencari penyebab terjadinya isu yang dalam hal ini adalah tidak memiliki database kontak Sekretariat AKD, Sekretariat Fraksi, dan TA anggota DPR RI, maka digunakanlah alat bantu analisis isu yang berbentuk *mind mapping*. *Mind mapping* adalah konsep atau kerangka pikiran yang berbentuk visual grafis. Mind mapping juga berarti pemetaan pemikiran konsep yang nantinya akan memunculkan ide atau pemikiran baru.



Gambar III. 6 Mind Mapping Penyebab Isu

Berdasarkan hasil *mind mapping* di atas, penyebab terjadinya isu prioritas yaitu tidak memiliki database kontak Sekretariat AKD, Sekretariat Fraksi, dan TA anggota DPR RI, terdapat tiga penyebab yang menyebabkan terjadinya isu prioritas tersebut, yaitu :

1. Data kontak yang berhubungan dengan DPR RI tercecer

Selama ini, pegawai mencari kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI sendiri-sendiri, di mana mereka mencari kontak dengan datang sendiri ke AKD terkait maupun bertanya kepada pegawai yang memiliki kontak tersebut.

2. Tidak ada upaya untuk mengumpulkan kontak yang berhubungan dengan DPR RI

Beberapa pegawai memiliki kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI setidaknya satu atau dua, namun mereka menyimpannya hanya untuk diri mereka sendiri dan baru akan membagikan kontak tersebut ketika diminta. Tidak ada upaya untuk mengumpulkan semua kontak-kontak tersebut dalam satu dokumen.

3. Tidak menyadari pentingnya memiliki data kontak yang terpadu

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : TVR Parlemen

Jabatan : Jurnalis

Identifikasi Isu :

1. Tidak ada crisis plan dalam menghadapi situasi krisis
2. Banyak penulisan berita yang tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI
3. Tidak ada database kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI

Isu Terpilih : Tidak ada database kontak tenaga ahli anggota DPR RI

Solusi Kreatif : Pembuatan Bank Kontak TA DPRI RI

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK
1	Identifikasi data dan penyusunan format entry data	Identifikasi data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan Bank Kontak DPR RI meliputi : jumlah AKD, jumlah fraksi, jumlah anggota DPR RI secara keseluruhan, jumlah anggota DPR RI per fraksi, dan jumlah anggota DPR RI per AKD, jumlah TA tiap anggota DPR RI, dan jumlah	Output : Rekap data tertulis jumlah AKD, jumlah fraksi, jumlah anggota DPR RI secara keseluruhan, jumlah anggota DPR RI per fraksi, dan jumlah anggota DPR RI per AKD yang didapatkan dari website www.dpr.go.id	Kompeten Untuk mengidentifikasi data, butuh kemampuan dan kompetensi dalam mencari dan memilah data Adaptif Penggunaan Cloud DPR RI sebagai media untuk

		<p>anggota DPR RI per fraksi</p> <p>Penetapan format entry Bank Kontak DPR RI dalam bentuk microsoft excel yang diintegrasikan ke Cloud DPR RI</p> <p>Format entry Bank Kontak DPR RI terdiri dari tiga pages yang terdiri dari page 1 untuk kontak TA DPR RI, page 2 untuk kontak Sekretariat AKD, page 3 untuk kontak Sekretariat Fraksi</p>	<p>Format entry Bank Kontak DPR RI dalam bentuk microsoft excel yang diupload di Cloud DPR RI</p>	<p>menyimpan Bank Kontak DPR RI sesuai dengan perkembangan zaman yang serba digitalisasi.</p> <p>Akuntabel</p> <p>Oleh karena Bank Kontak DPR RI berisi data-data pribadi maka pada saat proses identifikasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi agar tidak menyalahgunakan Bank Kontak DPR RI</p>
2	Berkoordinasi dengan Bagian Manajemen SDM Non PNS, Berkunjung ke Sekretariat AKD dan Sekretariat Fraksi	<p>Mengirim Surat Tugas ke Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dengan tembusan Bagian Manajemen SDM Non PNS</p> <p>Berkunjung ke Sekretariat AKD untuk meminta</p>	<p>Output :</p> <p>Surat Tugas terkait pengumpulan kontak dalam rangka Bank Kontak DPR RI</p> <p>Data kontak Sekretariat per AKD</p>	<p>Loyal</p> <p>Menyampaikan dan memenuhi surat tugas untuk pencarian data kontak yang berhubungan dengan DPR RI</p> <p>Menjamin kerahasiaan data kontak yang</p>

		<p>kontak person Sekretariat AKD</p> <p>Berkunjung ke Sekretariat Fraksi untuk meminta kontak person Sekretariat Fraksi</p>	<p>Kumpulan kontak TA Anggota DPR RI</p>	<p>berhubungan dengan anggota DPR RI</p> <p>Berorientasi Pelayanan</p> <p>Bertemu dengan pegawai Sekretariat dan TA dengan senyum, sopan dan tidak memaksa.</p> <p>Selalu mengutamakan etika dalam meminta data kontak</p> <p>Kolaboratif</p> <p>Bekerja sama untuk sama-sama menjaga kerahasiaan data kontak</p>
3	Input data kontak ke Bank Kontak DPR RI	<p>Input data kontak DPR RI ke microsoft excel yang sudah ditetapkan format entry datanya pada saat penyusunan format Bank Kontak DPR RI</p> <p>Sinkronisasi microsoft excel yang berisi data</p>	<p>Output :</p> <p>Bank Kontak DPR RI yang telah terintegrasi dengan Cloud DPR RI</p>	<p>Kompeten</p> <p>Butuh kemampuan dan kompetensi dalam mengolah Bank Kontak DPR RI</p> <p>Adaptif</p> <p>Penggunaan Cloud DPR RI sebagai media untuk menyimpan Bank Kontak DPR RI</p>

		<p>kontak DPR RI ke Cloud DPR RI</p>		<p>sesuai dengan perkembangan zaman yang serba digitalisasi</p> <p>Akuntabel</p> <p>Oleh karena Bank Kontak DPR RI berisi data-data pribadi maka pada saat proses pengolahan data kontak harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi agar tidak menyalahgunakan Bank Kontak DPR RI</p>
4	<p>Sosialisasi penggunaan bank kontak DPR RI ke pihak-pihak yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI</p>	<p>Bertemu dengan pihak-pihak yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI dan menjelaskan penggunaan Bank Kontak DPR RI</p> <p>Berdiskusi dengan mentor terkait siapa saja yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI</p>	<p>Output :</p> <p>Undangan sosialisasi</p> <p>Daftar nama hadir sosialisasi</p> <p>Daftar nama pihak-pihak yang memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI</p>	<p>Harmonis</p> <p>Bank Kontak DPR RI bukan hanya membantu proses produksi acara berita TVR Parlemen, tetapi juga program acara TVR Parlemen lainnya dalam hal mencari narasumber. Memudahkan dalam mencari narasumber</p> <p>Kolaboratif</p>

		<p>Penetapan nama-nama pihak yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI</p>		<p>Setiap divisi di TVR Parlemen bersama-sama berkomitmen untuk menggunakan Bank Kontak DPR RI sebaik mungkin</p> <p>Akuntabel</p> <p>TVR Parlemen berkomitmen untuk menggunakan Bank Kontak DPR RI secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi</p> <p>Loyal</p> <p>Bersama-sama menjaga agar Bank Kontak DPR RI tidak disalahgunakan</p>
--	--	---	--	---

Tabel IV. 1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

B. Stakeholder

Pembuatan Bank Kontak DPR RI Berbasis Cloud DPR RI ini akan bersentuhan dengan berbagai stakeholder, diantaranya adalah :

1. Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen
2. Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi
3. Koordinator Liputan
4. Koordinator Program
5. PIC Redaksi
6. Sekretariat AKD

7. Sekretariat Fraksi
8. TA anggota DPR RI

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Pembuatan bank kontak DPR RI berbasis Cloud DPR RI merupakan kumpulan data yang bersifat privat sehingga dituntut untuk memastikan bahwa pembuatan bank kontak DPR RI ini aman dan terhindar dari kebocoran data. Penulis harus meyakinkan pihak Sekretariat AKD, Sekretariat Fraksi maupun TA anggota DPR RI bahwa data pribadi mereka aman dan digunakan hanya untuk kepentingan pekerjaan. Untuk mengatasinya, penulis menggunakan Cloud DPR RI karena memiliki fitur-fitur keamanan yang baik. Selain itu, penulis juga membatasi akses menuju bank kontak DPR RI, sehingga penulis memastikan bahwa bank kontak DPR RI ini tidak disalahgunakan dan murni untuk menopang tugas dan fungsi di TVR Parlemen.

D. Analisis Dampak

Jika Bank Kontak DPR RI ini digunakan dengan baik untuk kepentingan liputan, maka dampak yang akan terjadi adalah :

1. Mempercepat proses produksi berita

Dengan mempersingkat waktu pencarian kontak narasumber yang dalam hal ini adalah kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI, maka proses produksi berita akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan narasumber.

2. Memperkaya dan meningkatkan kualitas berita

Semakin banyak sumber berita yang dalam hal ini adalah narasumber, maka akan semakin berkualitas dan berbobot suatu tulisan yang dalam hal ini adalah berita. Oleh karena kemudahan dalam mendapatkan narasumber, jurnalis bisa mendapatkan lebih banyak narasumber untuk bahan penulisan berita. Selain itu, DPR RI adalah lembaga politik yang di dalamnya terdapat koalisi dan oposisi. Dengan kemudahan mendapatkan narasumber, jurnalis bisa mendapatkan dua sudut pandang yang berbeda terkait suatu permasalahan, baik dilihat dari sudut pandang fraksi koalisi maupun fraksi oposisi. Dengan

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4	Sosialisasi penggunaan Bank Kontak DPR RI ke pihak-pihak yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI												
	a) Bertemu dengan pihak-pihak yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI												
	b) Diskusi terkait siapa saja yang berhak memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI												
	c) Penetapan nama-nama pihak yang memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI												
5	Penyusunan Laporan Aktualisasi												

Tabel IV. 2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	memiliki akses ke Bank Kontak DPR RI												
5	Penyusunan Laporan Aktualisasi												

Penyesuaian Matriks Aktualisasi

B. TAHAPAN KEGIATAN

Dalam proses aktualisasi, ada lima tahapan kegiatan yang dilakukan penulis, yaitu identifikasi dan penyusunan format entry data, berkoordinasi dengan Bagian Manajemen ASN Non PNS, input data kontak ke Bank Kontak DPR RI, dan sosialisasi penggunaan Bank Kontak DPR RI. Bila melihat kembali rancangan aktualisasi, maka terjadi perubahan pada tahapan kegiatan diantaranya dihapusnya tahapan berkoordinasi dengan Sekretariat AKD dan Sekretariat Fraksi dan memperpanjang waktu untuk tahapan input data kontak ke Bank Kontak DPR RI. Perubahan ini terjadi karena menyesuaikan kondisi lapangan saat proses pelaksanaan aktualisasi.

a. Identifikasi dan penyusunan format entry data

Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan data yang diperlukan untuk mengisi Bank Kontak DPR RI, pendataan ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak anggota DPR RI bila dilihat dari fraksinya dan berapa banyak anggota DPR RI bila dilihat dari AKD nya. Pada periode 2019 – 2024, total anggota DPR RI adalah 575 orang, total fraksi terdapat 9 fraksi dengan 10 AKD. Berikut hasil identifikasi data yang telah dilakukan.

No	Nama Fraksi	Singkatan	Jumlah Anggota	Presentase
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	FPDIP	128	22,26
2	Fraksi Partai Golongan Karya	FPG	85	14,78
3	Fraksi Gerakan Indonesia Raya	FGERINDRA	78	13,57
4	Fraksi Partai Nasdem	FNASDEM	59	10,26
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	FPKB	58	10,09
6	Fraksi Partai Demokrat	FPD	54	9,39
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	FPKS	50	8,70

8	Fraksi Partai Amanat Nasional	FPAN	44	7,65
9	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	FPPP	19	3,33
TOTAL			575	100

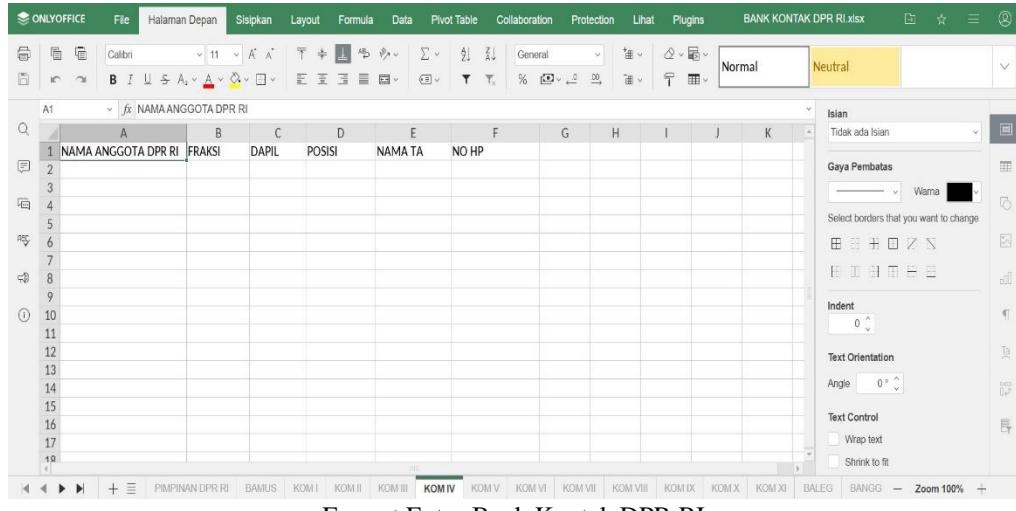
Jumlah Anggota DPR RI berdasarkan Fraksi

No	AKD	Jumlah Anggota
1	Pimpinan DPR RI	5
2	Badan Musyawarah	57
3	Komisi I	52
	Komisi II	51
	Komisi III	51
	Komisi IV	55
	Komisi V	55
	Komisi VI	54
	Komisi VII	53
	Komisi VIII	50
	Komisi IX	51
	Komisi X	54
	Komisi XI	56
4	Badan Legislasi	81
5	Badan Anggaran	99
6	Badan Urusan Rumah Tangga	26
7	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	51
8	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	9
9	Mahkamah Kehormatan Dewan	17

Jumlah Anggota DPR RI berdasarkan AKD

Keterangan : Beberapa anggota DPR RI ada yang merangkap di dua AKD, misal anggota DPR RI A selain di Komisi II juga ada di BKSAP

Selain mengumpulkan dan mengidentifikasi data, dilakukan juga penyusunan format entry Bank Kontak DPR RI. Format entry Bank Kontak DPR RI berbentuk dokumen excel yang terdiri dari 20 page sesuai dengan AKD nya masing-masing.



A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1	K1
1	NAMA ANGGOTA DPR RI	FRAKSI	DAPIL	POSISI	NAMA TA	NO HP				
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

Format Entry Bank Kontak DPR RI

Penulis menetapkan data kontak tenaga ahli DPR RI yang dibutuhkan untuk mengisi Bank Kontak DPR RI adalah setengah dari jumlah anggota DPR RI per AKD dengan memperhatikan kelengkapan fraksi. Misal, Komisi I DPR RI terdiri dari 50 orang, maka yang masuk ke Bank Kontak DPR RI hanya 25 orang dengan perwakilan masing-masing fraksi.

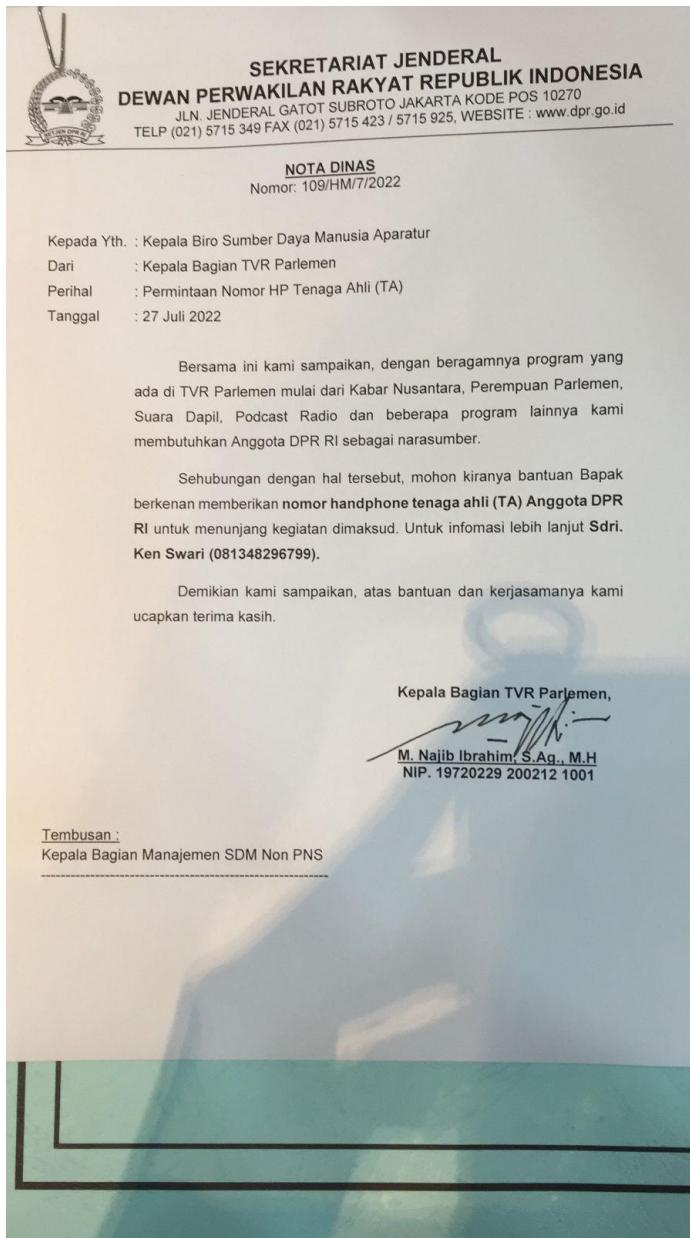
Setelah identifikasi data dan penyusunan format entry Bank Kontak DPR RI rampung, penulis membuat surat resmi yang ditujukan pada Biro Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dengan tebusan Bagian Manajemen SDM Non PNS untuk meminta data kontak tenaga ahli anggota DPR RI.

Pada tahapan ini juga penulis memutuskan untuk menghapus data email dari data yang diinput untuk Bank Kontak DPR RI. Penulis mempertimbangkan komunikasi via email tidak semasif komunikasi via WhatsApp, sehingga penulis menghapus email dari daftar data yang akan diinput di Bank Kontak DPR RI. Penulis juga menetapkan hanya dua kontak tenaga ahli anggota DPR RI yang diinput ke Bank Kontak DPR RI dari total tenaga ahli anggota DPR RI 6-7 orang per anggotanya.

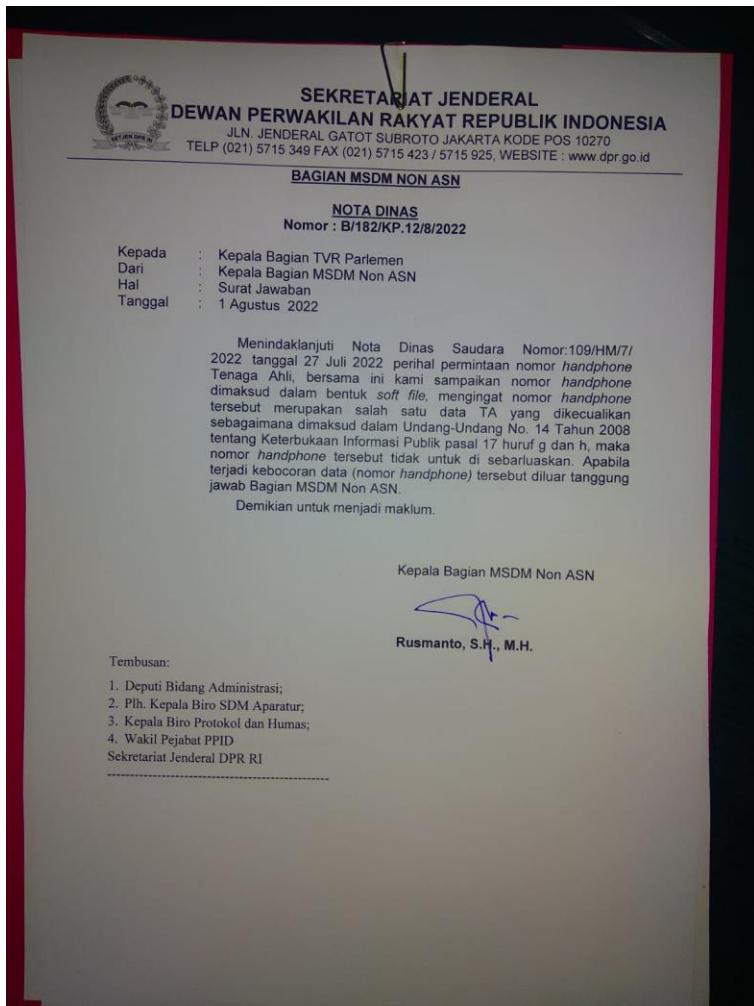
b. Berkoordinasi dengan Bagian Manajemen ASN Non PNS

Pada matriks jadwal aktualisasi pada laporan rancangan aktualisasi, disebutkan bahwa penulis berkoordinasi dengan Sekretariat AKD dan Sekretariat Fraksi untuk mendapatkan data kontak tenaga ahli anggota DPR RI. Kemudian, ketika penulis presentasi pada seminar rancangan aktualisasi, penguji menyarankan penulis untuk berkoordinasi dengan Bagian Manajemen SDM Non PNS untuk mendapatkan kontak tenaga ahli anggota DPR RI. Penulis pun melakukan saran yang diberikan penguji.

Pada tanggal 27 Juli 2022, penulis membuat surat yang ditujukan untuk Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dengan tebusan Bagian Manajemen SDM Non PNS dengan nomor surat 109/HM/7/2022. Surat tersebut kemudian diterima oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur keesokan harinya, 28 Juli 2022. Tanggal 04 Agustus 2022, Bagian Manajemen SDM Non PNS merespon surat resmi yang dikirim penulis dengan mengeluarkan surat jawaban dengan nomor surat B/182/KP.12/8/2022. Di hari yang sama, perwakilan dari Bagian Manajemen SDM Non PNS memberikan penulis daftar kontak tenaga ahli anggota DPR RI.



Surat Resmi Permintaan Nomor HP Tenaga Ahli Anggota DPR RI



Surat Jawaban dari Bagian Manajemen SDM Non PNS

Ketika penulis mengecek daftar kontak tenaga ahli yang diberikan oleh Bagian Majamen SDM Non PNS, alangkah terkejutnya penulis ternyata daftar kontak tenaga ahli anggota DPR RI ini sangat lengkap. Daftar kontak ini berisi semua kontak tenaga ahli anggota DPR RI. Anggota DPR RI berjumlah 575 orang dengan per masing-masing anggota memiliki tenaga ahli sebanyak 6 sampai 7 orang. Penulis terkejut karena semua kontak tenaga ahli anggota DPR RI terkumpul di data kontak tersebut. Penulis benar-benar berterima kasih pada penguji karena telah memudahkan program aktualisasi penulis dan meringkas tahapan koordinasi dengan pihak terkait.

Dengan lengkapnya data kontak tenaga ahli anggota DPR RI yang diberikan oleh Bagian Manajemen SDM Non PNS, maka penulis menghapus tahapan kegiatan yang berkoordinasi dengan Sekretariat AKD dan Sekretariat Fraksi.

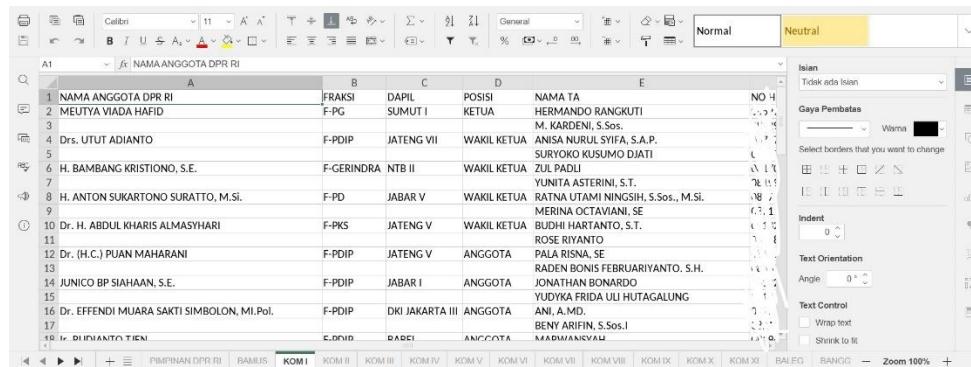
Oleh karena penulis telah mendapatkan data kontak tenaga ahli anggota DPR RI secara lengkap dan cepat atas saran dari penguji. Penulis mengubah jadwal aktualisasi dengan memajukan tahapan kegiatan input data kontak ke Bank Kontak DPR RI.

Bukan hanya penguji, penulis juga mendapatkan dukungan dari mentor penulis. Mentor penulis menyumbangkan data kontak dari Komisi III DPR RI, hal ini mempermudah penulis dalam menginput data kontak Komisi III DPR RI. Penulis sangat berterima kasih dengan mentor karena memberikan sumbangsih untuk program aktualisasi penulis.

c. Input data kontak ke Bank Kontak DPR RI

Oleh karena data kontak tenaga ahli anggota DPR RI telah terkumpul lengkap, maka penulis memajukan tahapan input data ke Bank Kontak DPR RI. Walaupun penulis dimudahkan dengan lengkapnya data kontak tenaga ahli anggota DPR RI, namun penulis menemukan tantangan baru dalam aktualisasi penulis, yaitu tahapan input data kontak tenaga ahli anggota DPR RI ke Bank Kontak DPR RI.

Tahapan input data kontak tenaga ahli Bank Kontak DPR RI merupakan tahapan yang paling menantang sekaligus melelahkan bagi penulis. Data kontak tenaga ahli yang diberikan Bagian Manajemen SDM Non PNS tidak mencantumkan di AKD mana anggota DPR RI tersebut menjabat, sehingga selain menginput data kontak tenaga ahli anggota DPR RI yang luar biasa banyak, penulis juga harus menyortir anggota DPR RI berdasarkan AKD nya karena penulis memang ingin membuat kumpulan kontak tenaga ahli anggota DPR RI yang diurutkan berdasarkan AKD nya agar stakeholder lebih mudah menemukan kontak tenaga ahli anggota DPR RI yang dicari untuk mengurangi stakeholder untuk terlalu sering scroll.



A	B	C	D	E	F
1 NAMA ANGGOTA DPR RI	FRAKSI	DAPIL	POSISI	NAMA TA	NO
2 MEUTYA VIADA HAFID	F-PG	SUMUT I	KETUA	HERMANDO RANGKUTI	4
3				M. KARDENI, S.Sos.	
4 Drs. UTUT ADIANTO	F-PDIP	JATENG VII	WAKIL KETUA	ANISA NURUL SYIFA, S.A.P.	
5				SURYOKO KUSUMO DIATI	
6 H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.	F-GERINDRA	NTB II	WAKIL KETUA	ZUL PADI	
7				YUNITA ASTERINI, S.T.	
8 H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si.	F-PD	JABAR V	WAKIL KETUA	RATNA UTAMI NINGSIH, S.Sos., M.Si.	
9				MERINA OCTAVIANI, SE	
10 Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI	F-PKS	JATENG V	WAKIL KETUA	BUDHI HARTANTO, S.T.	
11				ROSE RIYANTO	
12 Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI	F-PDIP	JATENG V	ANGGOTA	PALA RISNA, SE	
13				RADEN BONIS FEBRUARIYANTO, S.H.	
14 JUNICO BP SIAHAAN, S.E.	F-PDIP	JABAR I	ANGGOTA	JONATHAN BONARDO	
15				YUDYKA FRIDA ULI HUTAGALUNG	
16 Dr. EFFENDI MUARA SAKTI SIMBOLON, M.Pol.	F-PDIP	DKI JAKARTA III	ANGGOTA	ANI, A.MD.	
17				BENY ARIFIN, S.Sos.I	
18 Ir. DUDUNGANTO TIEN	F-PDIP	RABDI	ANGGOTA	KADOMANAYAU	

Screencapt isi Bank Kontak DPR RI

Ketika sudah memasuki hari akhir tahap input data kontak ke Bank Kontak DPR RI, penulis ternyata belum menyelesaikan proses input tersebut. Penulis memutuskan untuk memperpanjang tahapan input data kontak ke Bank Kontak DPR RI hingga minggu akhir Agustus 2022 hingga sosialisasi penggunaan Bank Kontak DPR RI. selain itu, penulis juga telah mengintegrasikan Bank Kontak DPR RI dengan Cloud DPR RI.

d. Sosialisasi penggunaan Bank Kontak DPR RI

Pada tanggal 26 Agustus 2022 tepatnya pada hari Jum'at penulis melakukan sosialisasi penggunaan Bank Kontak DPR RI pada stakeholder. Penulis melakukan sosialisasi tepat setelah rapat redaksi agenda setting mingguan selesai. Stakeholder penulis menyambut baik program aktualisasi penulis dan merasa terbantu dengan adanya Bank Kontak DPR RI. Divisi redaksi selaku stakeholder utama menyatakan mereka terbantu dengan adanya Bank Kontak DPR RI terutama di masa reses di mana anggota DPR RI kembali ke Daerah Pemilihannya masing-masing sehingga hanya sedikit anggota DPR RI yang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.



Suasana ketika Sosialisasi Penggunaan Bank Kontak DPR RI

DAFTAR HADIR SOSIALISASI BANK KONTAK DPR RI			
NO	NAMA	UNIT KERJA	TTD
1	Sigit Pobo Pambudi	TVR Parlemen	
2	Hilman	Redaksi	
3	Nur Faad	Redaksi	
4	Firdaus Darmi Prabowo	reporter	
5	Vinita P	Reporter	
6	Theresia Butar Butar	reporter	
7	Merling Tampubolon	Edisioner Wiskay / Reporter	
8	Dwi Ayu Lestari	TVR Parlemen	
9	ILA. R.	Reporter	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

2022/8/30 09:00

Daftar Hadir Sosialisasi Bank Kontak DPR RI

C. STAKEHOLDER

Stakeholder program aktualisasi Bank Kontak DPR RI terdiri dari dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah stakeholder yang berada dalam Sub Bagian TV Parlemen, sedangkan stakeholder sekunder adalah stakeholder yang berada di bawah Bagian TV dan Radio Parlemen namun berbeda Sub Bagian.

- Stakeholder Primer

- Divisi Redaksi

Divisi redaksi adalah divisi yang bertugas meliput agenda anggota DPR RI. hasil liputan agenda anggota DPR RI akan berbentuk hardnews atau berita. Berita hasil liputan agenda ini akan ditayangkan di TVR09, TVR17, dan

TVR120. Divisi Redaksi terdiri dari Koordinator Liputan, editor naskah, QC (*Quality Control*) naskah dan reporter atau jurnalis.

- Divisi Produksi

Divisi produksi adalah divisi yang bertugas memproduksi acara televisi non berita yang berkaitan dengan anggota DPR RI. Beberapa program acara TVR Parlemen adalah Kabar Nusantara, Perempuan Parlemen, Suara Dapil, House News, dsb

- Stakeholder Sekunder

- Sub Bagian Radio Parlemen

Sub Bagian Radio Parlemen mempunyai tugas melaksanaan pemberitaan melalui radio. Sub Bagian Radio Parlemen mengelola Radio Parlemen. Beberapa program Radio Parlemen adalah Pernyataan Wakil Rakyat, Warna-Warni Parlemen, Sudut Pandang Parlemen, Podcast Radio Parlemen, dsb.

D. KENDALI DAN STRATEGI MENGHADAPI KENDALA

Salah satu tantangan yang dihadapi penulis ketika menjalankan aktualisasi Bank Kontak DPR RI adalah data kontak yang diberikan Bagian Manajemen SDM Non PNS bersifat acak, tidak disortir berdasarkan AKD, sehingga penulis harus mengeluarkan effort untuk mengelompokkan anggota DPR RI berdasarkan AKD. Hal ini cukup menantang karena jumlah anggota DPR RI berjumlah 575 orang dengan tiap anggota 2 kontak tenaga ahli. Belum lagi beberapa anggota DPR RI yang merangkap 2 AKD. Selain itu, penulis juga kadang terdistraksi dengan hal-hal lain. Untuk mengatasinya, penulis mencicil input data kontak tenaga ahli anggota DPR RI secara bertahap dan memperpanjang jadwal input data kontak tenaga ahli anggota DPR RI ke Bank Kontak DPR RI serta mengerjakan input di saat penulis dalam konsentrasi penuh dan situasi kondusif.

Tantangan lainnya adalah memastikan data kontak Bank Kontak DPR RI tidak tersebar secara sembrono. Walaupun Bank Kontak DPR RI hanya berisi data kontak tenaga ahli anggota DPR RI, namun data kontak tetaplah data pribadi yang tidak boleh sembarangan disebar, terlebih mereka adalah pihak yang sangat dekat dengan anggota DPR RI. Salah satu upaya yang dilakukan penulis adalah mengerjakan input data di tempat yang

seperti Perpustakaan DPR RI dan memberikan password untuk mengakses Bank Kontak DPR RI. Password ini akan diganti secara berkala.

E. ANALISIS DAMPAK

Bank Kontak DPR RI memiliki berapa dampak bagi stakeholder, diantaranya :

1. Mempermudah membuat janji wawancara dengan anggota DPR RI ketika masa reses
Pada masa reses, anggota DPR RI kembali ke Daerah Pemilihannya masing-masing sehingga hanya sedikit anggota DPR RI yang ada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Pada masa sidang, membuat janji wawancara dengan anggota DPR RI tidaklah sulit, namun ketika masa reses, Bank Kontak DPR RI sangat—sangat dibutuhkan untuk membuat janji dengan anggota DPR RI.
2. Mempermudah komunikasi dengan anggota DPR RI terkait peliputan dan produksi acara
Dengan adanya Bank Kontak DPR RI, stakeholder bisa lebih mudah berkomunikasi dengan anggota DPR RI melalui tenaga ahlinya untuk kepentingan peliputan maupun produksi acara tanpa harus berlama-lama di ruang rapat AKD.
3. Mempercepat proses produksi berita dan acara
Dengan mempersingkat waktu pencarian kontak narasumber yang dalam hal ini adalah kontak yang berhubungan dengan anggota DPR RI, maka proses produksi berita dan acara akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan narasumber.
4. Memberikan banyak pilihan narasumber
Dengan adanya Bank Kontak DPR RI, memberikan stakeholder banyak pilihan narasumber untuk penulisan berita maupun produksi acara, sehingga menghilangkan kesan hanya mengangkat anggota-anggota tertentu saja.
5. Memperkaya dan meningkatkan kualitas berita
Semakin banyak sumber berita yang dalam hal ini adalah narasumber, maka akan semakin berkualitas dan berbobot suatu tulisan yang dalam hal ini adalah berita. Oleh karena kemudahan dalam mendapatkan narasumber, jurnalis bisa mendapatkan lebih banyak narasumber untuk bahan penulisan berita. Selain itu, DPR RI adalah lembaga politik yang di dalamnya terdapat koalisi dan oposisi. Dengan kemudahan mendapatkan narasumber, jurnalis bisa mendapatkan dua sudut pandang yang berbeda terkait suatu

permasalahan, baik dilihat dari sudut pandang fraksi koalisi maupun fraksi oposisi. Dengan mengetahui dua sudut pandang yang berbeda, jurnalis bisa membuat berita yang berimbang dan tidak condong sebelah.

LAMPIRAN

Fraksi DPR RI Periode 2019 – 2024

No	Nama Fraksi	Singkatan	Jumlah Anggota	Presentase
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	FPDIP	128	22,26
2	Fraksi Partai Golongan Karya	FPG	85	14,78
3	Fraksi Gerakan Indonesia Raya	FGERINDRA	78	13,57
4	Fraksi Partai Nasdem	FNASDEM	59	10,26
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	FPKB	58	10,09
6	Fraksi Partai Demokrat	FPD	54	9,39
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	FPKS	50	8,70
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	FPAN	44	7,65
9	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	FPPP	19	3,33
TOTAL			575	100

Alat Kelengkapan Dewan

1. Pimpinan DPR
2. Badan Musyawarah
3. Komisi
4. Badan Legislasi
5. Badan Anggaran
6. Badan Urusan Rumah Tangga
7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
8. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
9. Mahkamah Kehormatan Dewan
10. Panitia Khusus
11. Persidangan Paripurna

Jumlah Anggota DPR RI per AKD

No	AKD	Jumlah Anggota
1	Pimpinan DPR RI	5
2	Badan Musyawarah	57
3	Komisi I	52
	Komisi II	51
	Komisi III	51

	Komisi IV	55
	Komisi V	55
	Komisi VI	54
	Komisi VII	53
	Komisi VIII	50
	Komisi IX	51
	Komisi X	54
	Komisi XI	56
4	Badan Legislasi	81
5	Badan Anggaran	99
6	Badan Urusan Rumah Tangga	26
7	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	51
8	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	9
9	Mahkamah Kehormatan Dewan	17

Keterangan : Beberapa anggota DPR RI merangkap sebagai anggota AKD yang lain. Contoh A adalah anggota Komisi VIII, tapi juga sebagai anggota Badan Legislasi.

Microsoft Word ribbon interface showing a table of DPR RI members.

Table Headers:

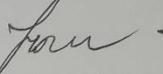
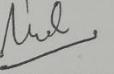
A	B	C	D	E	NO
---	---	---	---	---	----

Table Data:

1 NAMA ANGGOTA DPR RI	FRAKSI	DAPIL	POSISI	NAMA TA	4
2 MEUTYA VIADA HAFID	F-PG	SUMUT I	KETUA	HERMANDO RANGKUTI	
3				M. KARDENI, S.Sos.	
4 Drs. UTUT ADIANTO	F-PDIP	JATENG VII	WAKIL KETUA	ANISA NURUL SYIFA, S.A.P.	
5				SURYOKO KUSUMO DJATI	
6 H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.	F-GERINDRA	NTB II	WAKIL KETUA	ZUL PADLI	
7				YUNITA ASTERINI, S.T.	
8 H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si.	F-PD	JABAR V	WAKIL KETUA	RATNA UTAMI NINGSIH, S.Sos., M.Si.	
9				MERINA OCTAVIANI, SE	
10 Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI	F-PKS	JATENG V	WAKIL KETUA	BUDHI HARTANTO, S.T.	
11				ROSE RIVANTO	
12 Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI	F-PDIP	JATENG V	ANGGOTA	PALA RISNA, SE	
13				RADEN BONIS FEBRUARIYANTO, S.H.	
14 JUNICO BP SIAHAAN, S.E.	F-PDIP	JABAR I	ANGGOTA	JONATHAN BONARDO	
15				YUDYKA FRIDA ULI HUTAGALUNG	
16 Dr. EFFENDI MUARA SAKTI SIMBOLON, M.Pol.	F-PDIP	DKI JAKARTA III	ANGGOTA	ANI, A.MD.	
17				BENY ARIFIN, S.Sos.I	
18 Ir. BUDIANTO TIEN	F-PDIP	DADI	ANGGOTA	MARDIYANCAVALU	



DAFTAR HADIR SOSIALISASI BANK KONTAK DPR RI

NO	NAMA	UNIT KERJA	TTD
1	Sigit Roho Pambudi	TVR Parlemen	
2	Hilman H	Redaksi	
3	Nur Faad-	Redaksi	
4	Firdaus Panji prabowo	report.	
5	Vinita P	Reporter	
6	Theresia Butar Butar	reporter	
7	Mariina Tampubolon	Editorial Nasional / Reporter	
8	Dwi Ayu Lestari	TVR Parlemen	
9	ILA.R.	Reporter	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

2022/8/30 09:00



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualilsasi Minggu Ke 1 & 2

Nama : Ken Swari Mulia Nanda Putri
NIP : 199510262022022001
Unit Kerja : TVR Parlemen
Isu : Tidak ada database yang berisi data kontak TA Anggota DPR RI
Gagasan : Pembuatan Bank Kontak DPR RI

No	Kegiatan	Evidance
1	Identifikasi data-data yang dibutuhkan untuk mengisi Bank Kontak DPR RI (Minggu I)	Data Rekap jumlah anggota DPR RI, jumlah anggota DPR RI per Fraksi dan Jumlah anggota DPR RI per AKD https://docs.google.com/document/d/1t1yBTJ_MlzJBpJLqaM0radN4oc-F-1A6/edit?usp=sharing&ouid=108738058814586233460&rtpof=true&sd=true
2	Penetapan format Bank Kontak DPR RI (Minggu I)	Format Entry Bank Kontak DPR RI https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLXx9eWj1Ko4zvMNGKvCAXjunRnbCtby/edit?usp=sharing&ouid=108738058814586233460&rtpof=true&sd=true
3	Mengirim surat tugas ke Biro Sumber	Nota Dinas Nomor 109/HM/7/2022

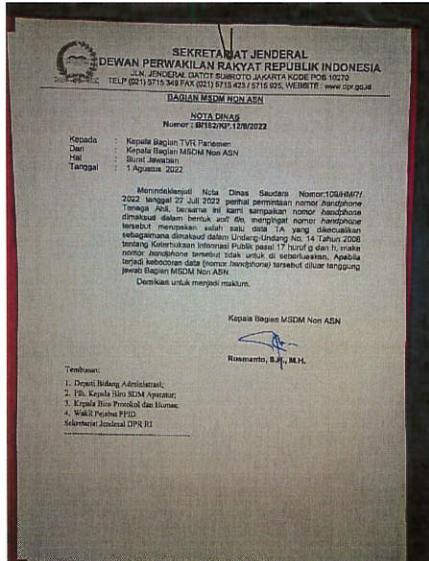


SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

<p>Daya Manusia Aparatur dengan tembusan Bagian Manajemen SDM Non PNS (Minggu II)</p>	<p></p> <p>Tanda Terima dari Bagian Manajemen SDM Non PNS</p> <p></p>
---	--



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

		<p style="text-align: center;">Nota Dinas Nomor B/182/KP.12/8/2022</p> 
4	Menerima Data Kontak TA DPR RI dari Bagian Manajemen SDM Non PNS (Minggu II)	Data Kontak TA DPR RI 

Jakarta, 08 Agustus 2022

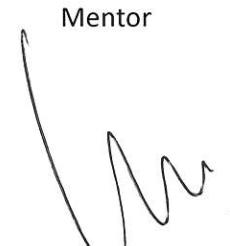
Mengetahui,

Coach



Agus Supriyono, S.S.,M.A.P.
NIP. 196902082003121003

Mentor



M. Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P.
NIP. 19770501199831003



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualilsasi Minggu Ke 3

Nama : Ken Swari Mulia Nanda Putri
NIP : 199510262022022001
Unit Kerja : TVR Parlemen
Isu : Tidak ada database yang berisi data kontak TA Anggota DPR RI
Gagasan : Pembuatan Bank Kontak DPR RI

No	Kegiatan	Evidence
1	Input data kontak TA anggota DPR RI ke Bank Kontak DPR RI	BANK KONTAK DPR RI BERBASIS CLOUD DPR RI : https://bit.ly/BankKontakDPRRI
2	Sinkronisasi Bank Kontak DPR RI dengan akun Cloud DPR RI	

Jakarta, 19 Agustus 2022

Mengetahui,

Coach

Agus Supriyono, S.S.,M.A.P.
NIP. 196902082003121003

Mentor

M. Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P.
NIP. 19770501199831003



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualilsasi Minggu Ke 4

Nama : Ken Swari Mulia Nanda Putri
NIP : 199510262022022001
Unit Kerja : TVR Parlemen
Isu : Tidak ada kumpulan kontak TA anggota DPR RI
Gagasan : Bank Kontak DPR RI

No.	Kegiatan	Evidence
1	Sosialisasi dan Diskusi Penggunaan Bank Kontak DPR RI	Hari: Jumat, 26 Agustus 2022 Lokasi: Ruang redaksi, Produksi dan Program

Jakarta, 30 Agustus 2022

Coach

Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP 196902082003121003

Mengetahui,
Mentor

Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P.
NIP 197705011998031003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022**

Nama Mentor : Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P

Nama Peserta : Ken Swari Mulia Nanda Putri
NIP : 199510262022022001
Unit Kerja : TVR Parlemen
Jabatan : Jurnalis
Isu Kegiatan : Tidak ada database kumpulan kontak kontak TA anggota DPR RI

No.	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Penguatan Nilai BerAKHLAK	Catatan Mentor	Paraf mentor
1	25 Juli 2022	Identifikasi dan penyusunan format entry data	Rekapitulasi Data Anggota DPR RI	Kompeten Untuk mengidentifikasi data, butuh kemampuan dan kompetensi dalam mencari dan memilah data	<i>Baik</i>	
2	27 Juli 2022	Mengirim surat ke Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dengan tembusan Bagian Manajemen SDM Non PNS	Nota Dinas Nomor 109/HM/7/2022	Loyal Menyampaikan dan memenuhi surat tugas untuk pencarian data kontak TA DPR RI Kolaboratif Bekerja sama dengan unit kerja lain untuk saling memudahkan pekerjaan	<i>Ok</i>	<i>J</i>
3	04 Agustus 2022	Menerima balasan surat dari Bagian Manajemen SDM Non PNS dan data kontak TA anggota DPR RI	Nota Dinas Nomor B/182/KP.12/8/22	Harmonis Saling membantu antara unit kerja yang berbeda Loyal Bersama-sama untuk tidak menyebarkan data kontak TA	<i>Ok</i>	<i>J</i>



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

			anggota DPR RI secara sembarang	
4	08 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022	Input data kontak TA anggota DPR RI ke Bank Kontak DPR RI	Bank Kontak DPR RI	Kompeten Butuh kemampuan dan kompetensi dalam mengolah Bank Kontak DPR RI
5	26 Agustus 2022	Sosialisasi Bank Kontak DPR RI	Daftar Hadir Sosialisasi Bank Kontak DPR RI	Harmonis Bank Kontak DPR RI memudahkan unit kerja TVR Parlemen untuk menghubungi anggota DPR RI terkait kepentingan produksi berita dan acara TVR Parlemen



SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama : Ken Swari Mulia Nanda Putri
Instansi: Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199510262022022001

Nama Coach: Agus Supriyono, S.S., M.A.P

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	21 Juli 2022	Konsul pasca seminar Rancangan Aktualisasi	Online via Zoom	Revisi rancangan aktualisasi sesuai dengan catatan pengaji	
2	08 Agustus 2022	Laporan aktualisasi minggu ke 1 dan minggu ke 2	Tatap muka	Gunakan bit.ly atau QR Code untuk akses evidence yang berbentuk dokumen	
3	19 Agustus 2022	Laporan aktualisasi minggu ke 3	Tatap muka	Buat testimonи stakeholder aktualisasi latsar Buat video teaser aktualisasi Buat flipbook laporan aktualisasi	
4	30 Agustus 2022	Laporan aktualisasi minggu ke 4	Tatap muka	Pematangan persiapan seminar laporan aktualisasi	